LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 INSPEKTORAT IV

Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga melayani bangsa

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja Inspektorat IV TA 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Inspektorat IV TA 2025 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian target kinerja setelah melalui pemantauan dan evaluasi capaian kinerja Inspektorat IV di TA 2025.

Laporan kinerja ini disusun dalam rangka untuk memberikan informasi capaian kinerja secara terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai. Lebih lanjut, informasi kinerja dalam laporan ini berfungsi sebagai pengendalian atas perkembangan capaian kinerja Inspektorat IV dan menjadi bahan perbaikan pelaksanaan kegiatan dan peningkatan kinerja kedepan.

Terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak atas tersusunnya laporan ini. Kami berharap kritik dan saran membangun untuk meningkatkan peran dan mutu Inspektorat IV dalam hal penjaminan kualitas (*Quality Assurance*) dan pemberian advis (*Advisory Services*) pada pelaksanaan program dan kegiatan mitra kerja untuk mendukung peran Inspektorat Jenderal (Itjen) sebagai Katalisator Pembaharuan Kinerja pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Jakarta, 19 Januari 2026

Ditandatangani
Secara Elektronik

Febry Budianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

RINGKASAN EKSEKUTIF

Sebagai Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat IV menjalankan mandat untuk melaksanakan pengawasan intern yang dapat memberikan nilai tambah terhadap pencapaian tujuan kementerian. Melalui pelaksanaan tugas dan fungsinya, Inspektorat IV berupaya untuk memberikan keyakinan kepada pimpinan kementerian bahwa penyelenggaraan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan telah berjalan secara efektif, efisien, andal, dan senantiasa sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Agar dapat berkontribusi secara efektif dalam memberikan keyakinan atas pencapaian tujuan KKP, pengawasan intern dilaksanakan dengan cara menggunakan pendekatan yang sistematis dan terukur dengan mengacu kepada standar pengawasan yang berlaku.

Dalam rangka pencapaian tujuan, program yang ditetapkan pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Itjen KKP Tahun 2025 adalah Program Dukungan Manajemen yang dilaksanakan melalui kegiatan pengawasan intern. Keberhasilan program tersebut didukung melalui pencapaian kinerja pada Inspektorat IV yang terdiri dari 2 (dua) Sasaran Kegiatan yaitu Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV dan Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal Lingkup Inspektorat IV dengan 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU). Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), capaian kinerja Inspektorat IV TA 2025 mendapatkan predikat Baik dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 112,30% (Istimewa) dengan rincian dari 7 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan yang diukur pada tahun 2025 ini, 1 IKU tercapai sesuai target (100%), dan 6 IKU tercapai melebihi target (>100%).

Capaian kinerja Inspektorat IV TA 2025 antara lain: 1) Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV sebesar 0,18% dari target ≤ 0,5%; 2) Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV sebesar 89,55% dari target 86%; 3) Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV sebesar 91,94% dari target 85%; 4) Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV sebanyak 8 rekomendasi dari target 4 rekomendasi; 5) Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV sebesar 95,54 dari target 85; 6) Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Inspektorat IV sebesar 91,70% dari target 80%, dan; 7) Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV sebesar 100% dari target 100%.

Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat IV TA 2025 mencapai Rp1.283.823.628,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp1.283.829.000,00. Penggunaan sumber daya anggaran ini dapat dinilai cukup efisien karena dengan realisasi anggaran tersebut (99,99%) dapat dihasilkan kinerja yang melebihi target (Skor Kinerja: 112,30%). Dengan demikian, efisiensi anggaran yang dapat dihasilkan mencapai 12,30%. Efisiensi anggaran dapat dicapai oleh Inspektorat IV sebagai hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan) dalam satu kali pengawasan, pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penerapan pengawasan berbasis resiko.

Dalam pencapaian kinerja Inspektorat IV selama TA 2025 tidak ditemukan kendala/permasalahan berarti yang dapat mempengaruhi capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja karena Inspektorat IV telah melakukan upaya-upaya dalam optimalisasi pengelolaan kinerja dan anggaran sesuai dengan perkembangan kebijakan seperti pelaksanaan pengawasan jarak jauh (daring/*online*).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI iv
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 1
C. Tugas Dan Fungsi 2
D. Agenda Inspektorat IV 3
E. Sumber Daya 5
F. Tujuan Pengukuran Kinerja 6
G. Ruang Lingkup 7
H. Metodologi Pengukuran Kinerja 7
I. Sistematika Laporan 7
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 8
A. Rencana Strategis KKP Dan Itjen KKP Tahun 2025 - 2029 8
B. Rencana Kinerja Tahunan 10
C. Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 11
D. Program Dan Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV 11
E. Rencana Aksi Pencapaian Target Indikator Kinerja 12
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 13
A. Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV 13
B. Capaian Kinerja Inspektorat IV 13
C. Analisis Pengelolaan Sumberdaya Anggaran 28
BAB IV PENUTUP 33
A. Kesimpulan 33
B. Permasalahan 33
C. Rencana Perbaikan 33
D. Tindak Lanjut Atas Laporan Kinerja Sebelumnya 34
LAMPIRAN 36

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat IV TA 2025 5
Tabel 2 Indikasi Risiko Sasaran Program Inspektorat Jenderal KKP 10
Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat IV TA 2025.....11
Tabel 4 Penilaian Capaian Kinerja 13
Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat IV TA 2025.....14
Tabel 6 Perkembangan Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%) 16
Tabel 7 Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%).....16
Tabel 8 Perkembangan Realisasi IKU Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%) 18
Tabel 9 Perkembangan Realisasi IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%) 21
Tabel 10 Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV 21
Tabel 11 Perkembangan Realisasi IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV.....22
Tabel 12 Perkembangan Realisasi IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV 25
Tabel 13 Perkembangan Realisasi IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV.....26
Tabel 14 Perkembangan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV.....27
Tabel 15 Realisasi Anggaran Inspektorat IV TA 2025.....28
Tabel 16 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2021-2025 29
Tabel 17 Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2025 29
Tabel 18 Efisiensi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2025 Per Jenis Capaian Kinerja ..32

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat IV TA 2025 6
Gambar 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV TA 2025..... 14

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Itjen KKP sebagai bagian integral dari KKP sebagai unit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Itjen memiliki mandat untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi KKP melalui pengendalian pelaksanaan program/kegiatan pembangunan bidang KP agar sesuai dengan rencana dan tujuan serta sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*). Dengan peran strategis tersebut, Itjen KKP dituntut untuk dapat melaksanakan kegiatan pegawasan intern secara profesional dan berkualitas.

Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Itjen KKP, Inspektorat IV selaku salah satu unit pelaksana kinerja Itjen KKP melakukan pengukuran dan evaluasi pelaksanaan kegiatan secara periodik melalui mekanisme pelaporan kinerja untuk memastikan perkembangan capaian kinerja sesuai dengan harapan selanjutnya menjadi dasar pengambilan kebijakan atau aksi yang diperlukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran kinerja yang telah ditentukan. Pelaporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV yang bertujuan untuk memberikan informasi atas berbagai capaian dan kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas/fungsi selama satu tahun. Pelaporan kinerja dilakukan dengan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang telah dilakukan.

B. DASAR HUKUM

Dalam melaksanakan tugas pengawasan, Inspektorat IV melaksanakan tugas dan fungsi dengan mengacu pada peraturan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2023 tentang Kementerian Kelautan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Perikanan;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Umum Pengumpulan Data Kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Inspektorat Jenderal Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025 Nomor: 032.02.0/2024 tanggal 02 Desember 2024.

C. TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, Itjen KKP memiliki tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan KKP. Dalam melaksanakan tugas tersebut Itjen KKP menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan kementerian;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan Kementerian;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan kementerian;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Inspektorat IV mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dan rencana program, pelaksanaan, pemantauan tindak lanjut hasil, dan pelaporan hasil pengawasan intern pada Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (Ditjen PDSPKP) dan Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan (BPPMHKP) serta unit pelaksana teknis pada Ditjen PDSPKP, dan unit pelaksana teknis pada BPPMHKP dan Ditjen PDSPKP. Secara lebih rinci, Inspektorat IV menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
2. Penyusunan rencana program pengawasan intern lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
3. Pengawasan Intern terhadap kinerja, keuangan dan non keuangan, melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya lingkup Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP;
4. Koordinasi pelaporan pengawasan pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
5. Pelaporan Hasil Pengawasan dan;
6. Pelaksanaan urusan tata usaha dan kerumahtanggaan Inspektorat IV.

D. AGENDA INSPEKTORAT IV

Perbaikan tata kelola pemerintahan yang baik menjadi isu yang penting dalam konteks nasional dan internasional, sehingga dijadikan salah satu agenda pembangunan nasional. Wujud dari perbaikan tata kelola pemerintahan ini antara lain berupa penurunan tingkat korupsi, perbaikan pelayanan publik, dan pengurangan ekonomi biaya tinggi. Tantangan di masa mendatang, perlu upaya yang lebih keras dan sistematis untuk memperbaiki praktik tata kelola pemerintahan.

Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dalam pemantapan tata kelola pemerintahan untuk menjaga agar kelangsungan pembangunan tetap berkelanjutan. Pemantapan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dilaksanakan melalui terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Selama ini, terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

efisiensi dan efektivitas kerja, serta masih rendahnya kualitas pelayanan umum.

Itjen KKP melaksanakan agenda pembangunan nasional yang berupa Tata Kelola Pemerintahan yang baik melalui Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Negara. Dalam mendukung agenda tersebut, Inspektorat IV melaksanakan agenda sebagai berikut:

1. Pengawasan Kinerja Pembangunan KP pada mitra Inspektorat IV.
   Evaluasi Pengelolaan PNBP dan Tata Kelola Perizinan
2. Pengawasan Kegiatan Prioritas KP:
   a. Pembangunan Sentra Kuliner Ikan;
   b. Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
   c. Pembangunan Pabrik Es;
   d. Pembangunan Gudang Beku Portable;
   e. Pengadaan Peralatan Pengolahan;
   f. Pengadaan Kendaraan Berpendingin;
   g. Pengadaan Peralatan Pemasaran;
   h. Implementasi Pemenuhan Standar Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Kelautan dan Perikanan Sektor Produksi Pasca Panen yang Mendukung Penangkapan Ikan Terukur (PIT) dan Pengembangan Perikanan Budi Daya di Laut, Pesisir, dan Darat yang Berkelanjutan;
   i. Keberterimaan Sistem Jaminan Mutu di Negara Tujuan Ekspor;
   j. Pengawasan Mutu Hasil Perikanan di Wilayah RI;
   k. Implementasi Metode dan Standar Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan;
   l. Tindak Lanjut Rekomendasi DG Sante
3. Pengawasan Mandatori:
   a. Reviu Laporan Keuangan;
   b. Reviu Laporan Kinerja;
   c. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
   d. Evaluasi Penyusunan Perubahan *Road Map* Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 Kementerian Kelautan dan Perikanan;
   e. Evaluasi implementasi SAKIP;
   f. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;
   g. Reviu RKA-K/L Tahun 2026;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

h. Evaluasi Pelayanan Publik;
i. Reviu Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN Tahun 2027;
j. Reviu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK);
k. Reviu Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri Maturitas SPIP.

4. Pengawasan Tematik
   a. Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen dan BPK-RI;
   b. Evaluasi Pemanfaatan BMN;
   c. Evaluasi Pengelolaan BMN;
   d. Evaluasi Kepegawaian;
   e. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan;
   f. Evaluasi Implementasi Manajemen Risiko;
   g. Evaluasi Telaah Sejawat Internal;
   h. Evaluasi Efektivitas Pengelolaan BMN.

E. SUMBER DAYA

Sumber Daya Manusia

Inspektorat IV dalam menjalankan tugas dan fungsi didukung dengan sumber daya manusia sebanyak 30 pegawai dengan rincian disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 1 Komposisi Sumber Daya Manusia Inspektorat IV TA 2025

No	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Inspektur IV	1
2.	Auditor Utama	2
3.	Auditor Madya	5
4.	Auditor Muda	7
5.	Auditor Pertama	7
6.	Auditor Pelaksana	1
7.	Kepala SubBagian Tata Usaha	1
8.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Madya	1
9.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	1
10.	Perencana Pertama	1
11.	Analis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	1
12	Pengelola Surat	1
13	PPPK Paruh Waktu	1
Jumlah		**30**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Struktur Organisasi Inspektorat IV disajikan pada Gambar berikut.

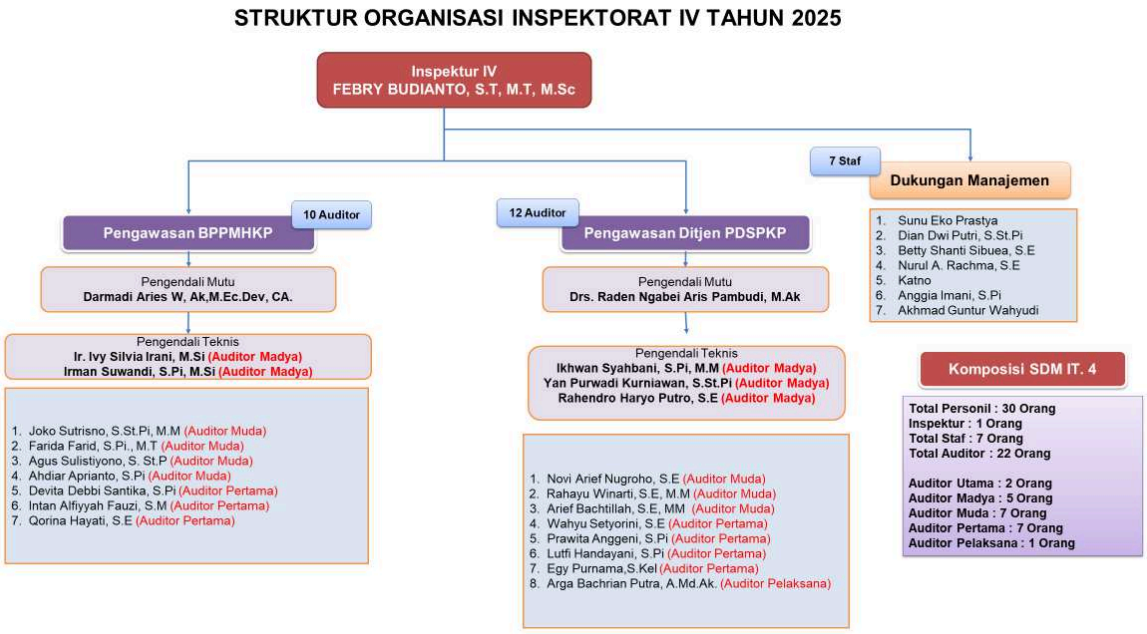

Gambar 1 Struktur Organisasi Inspektorat IV TA 2025

Sumber Daya Anggaran

Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan dan dukungan operasional pengawasan, Inspektorat IV TA 2025 pada awalnya memperoleh pagu anggaran sebesar Rp4.614.723.000,00 namun terdapat kondisi sebagai berikut:

1. Blokir anggaran sebesar Rp4.306.812.000,00 atau 93,33%; dan
2. Pagu efektif yang dapat digunakan sebesar Rp307.911.000,00 terdiri dari:
   a. Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV sebesar Rp279.233.000,00;
   b. Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV sebesar Rp28.678.000,00.

Pada bulan November 2025 Inspektorat IV mendapatkan tambahan dari relaksasi anggaran sebesar Rp975.918.000,00 sehingga pagu anggaran inspektorat IV pada TA.2025 adalah sebesar Rp1.283.829.000,00.

F. TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja Inspektorat IV sampai dengan Triwulan IV Tahun 2025 sesuai yang tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
2. Menilai dan mengevaluasi upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja sebagai bahan masukan untuk perbaikan kinerja Inspektorat IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

G. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pengukuran kinerja mencakup pengukuran dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat IV dan Rencana Aksi Kinerja yang diukur pada Tahun 2025.

H. METODOLOGI PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan dengan:

1. Pengukuran atas Sasaran Kinerja Inspektorat IV berdasarkan Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025;
2. Pengukuran atas Rencana Aksi pencapaian IKU Inspektorat IV Tahun 2025.

I. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi: 1) Pendahuluan yang mencakup Latar Belakang, Dasar Hukum, Tugas dan Fungsi, Agenda Inspektorat IV, Sumber Daya, Dasar Pengukuran Kinerja, Ruang Lingkup, Waktu Pengukuran Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja dan Sistematika Laporan; 2) Perencanaan dan Perjanjian Kinerja yang mencakup Rencana Strategis KKP dan Itjen KKP Tahun 2025 – 2029, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025, Program dan Kegiatan Pengawasan Inspektorat IV dan Rencana Aksi Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan; 3) Akuntabilitas Kinerja yang mencakup Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV, Capaian Kinerja Inspektorat IV, Analisis Pengelolaan Sumber Daya Anggaran dan Realisasi Rencana Aksi; dan 4) Penutup yang mencakup kesimpulan, permasalahan dan rencana perbaikan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KKP DAN ITJEN KKP TAHUN 2025 - 2029

Pada prinsip penjenjangan kinerja, Rencana Strategis Kementerian merupakan dasar atau acuan bagi unit Eselon I dalam menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan peran dan fungsinya. Dalam hal ini, Itjen selaku APIP mendukung Rencana Strategis KKP melalui program/kegiatan pengawasan intern.

Visi-Misi KKP berdasarkan Renstra Tahun 2025 - 2029 dan turunannya pada Itjen KKP sebagai salah satu unit Eselon I dibawahnya disampaikan sebagai berikut:

1. Visi KKP dan Itjen KKP

Visi KKP, bisa diartikan sebagai keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun serta gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

"Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan dalam rangka mewujudkan Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045"

Visi KKP tersebut ditujukan untuk mendukung visi Presiden khususnya yang terkait dengan hasil pembangunan yang ingin diwujudkan di bidang kelautan dan perikanan. Visi Inspektorat Jenderal tahun 2025 – 2029 yang ditetapkan untuk mendukung visi dan misi KKP, yaitu :

"Terwujudnya Pengawasan Intern yang Andal dan Bernilai Tambah Dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan"

Dalam pernyataan visi tersebut, nilai tambah pengawasan dalam mengawal Pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan diwujudkan melalui bentuk "trusted advisor". Nilai tambah melalui bentuk trusted advisor berarti Inspektorat Jenderal mengupayakan dan mempertahankan kepercayaan mitra melalui pengawasan intern berkualitas yang dilaksanakan sepenuhnya untuk menjawab kebutuhan unit kerja mitra dan para pemangku kepentingan melalui aktivitas penjaminan kualitas (quality assurance) dan pemberian layanan konsultansi (advisory services), serta peningkatan kualitas GRC (Governance, Risk, and Compliance) terhadap arah kebijakan strategis dan tujuan KKP.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

2. Misi Itjen KKP

Untuk mewujudkan visi dimaksud, Inspektorat Jenderal merumuskan misi yang mencerminkan mandat dan kegiatan inti pengawasan intern. Misi tersebut menjadi pernyataan Inspektorat Jenderal atas keberadaan, dan tindakan operasional organisasi pengawas intern dalam mencapai visi organisasi. Misi tersebut dirumuskan berupa :

Menyelenggarakan pengawasan intern yang profesional untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik serta meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

3. Tujuan Itjen KKP

Sebagai penjabaran dari visi dan misi Inspektorat Jenderal sebagaimana diruraikan di atas, tujuan dari penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP adalah :

Terwujudnya pengawasan intern yang efektif dan efisien serta memberikan nilai tambah dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan pencapaian kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

4. Sasaran Kegiatan

Sasaran strategis Inspektorat Jenderal sebagai unit kerja eselon I merupakan Sasaran Program yang menjabarkan kondisi yang harus dicapai atau diwujudkan dalam tataran operasional sebagai ukuran dari tercapainya tujuan. Sasaran Program diukur melalui indikator kinerja yang menjadi ukuran kualitatif atas tercapainya Sasaran Program.

1. **Sasaran Pertama**, yaitu Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP. Sasaran tersebut merupakan komitmen Inspektorat Jenderal dalam mewujudkan tujuan pengawasan intern terhadap kinerja organisasi KKP yang diukur melalui indikator kinerja terkait nilai temuan BPK RI atas Laporan Keuangan KKP, implementasi Reformasi Birokrasi KKP, rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja KKP, dan kepuasan pemangku kepentingan atas kinerja Inspektorat Jenderal.
2. **Sasaran Kedua**, yaitu Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal. Sasaran tersebut menjadi bentuk keseriusan Inspektorat Jenderal dalam memperkuat tata kelola dan akuntabilitas pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan KKP. Sasaran tersebut diimplementasikan dengan beberapa ukuran indikator kinerja mengenai kapabilitas pengawasan Inspektorat Jenderal,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

implementasi sistem informasi pengawasan, dan implementasi reformasi birokrasi Inspektorat Jenderal.

Dalam menjamin tercapainya sasaran program atas penyelenggaraan pengawasan intern di lingkungan KKP, dirumuskan indikasi risiko pada masing-masing sasaran program. Indikasi risiko tersebut menjadi acuan Inspektorat Jenderal dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern beserta dukungan manajemen penyelenggaraan pengawasan intern. Perumusan indikasi risiko terhadap sasaran program sebagai berikut:

Tabel 2 Indikasi Risiko Sasaran Program Inspektorat Jenderal KKP

No.	Sasaran Program	Indikasi Risiko
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja KKP	• Kurangnya kematangan manajemen risiko yang menghambat implementasi pengawasan intern berbasis risiko • Adanya praktik KKN yang menyebabkan rendahnya integritas pada penyelenggaraan pemerintahan • Ketidaktepatan perumusan program kerja pengawasan intern yang menyebabkan kurangnya relevansi fokus pengawaan dengan tujuan
2.	Tata Kelola Pengawasan yang Akuntabel dan Andal	Kurangnya daya dukung sumber daya pengawasan intern yang menyebabkan turunnya kualitas pengawasan intern

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen TA 2025, Inspektorat IV melaksanakan kegiatan Pengawasan Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV dan Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

1. Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan (LK) Mitra Inspektorat IV
2. Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV
3. Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV
4. Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV
5. Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV
6. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV
7. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

C. PERJANJIAN KINERJA INSPEKTORAT IV TAHUN 2025

Sebagai penjabaran dari sasaran kinerja Itjen, Inspektorat IV selaku unit pelaksana pengawasan internal pada Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP mendapatkan tanggung jawab untuk mewujudkan Sasaran Kegiatan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsinya dan telah ditetapkan target Indikator Kinerja Kegiatan pada masing-masing sasaran Kinerja Kegiatan yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat IV TA 2025 yang disajikan pada tabel 3.

Tabel 3 Perjanjian Kinerja Inspektorat IV TA 2025

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1.	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1.	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 0,5
		2.	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86
		3.	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86
		4.	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
2.	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5.	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85
		6.	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	80
		7.	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100

Perjanjian kinerja Inspektorat IV TA 2025 dalam bentuk dokumen Perjanjian Kinerja antara Inspektur IV dan Inspektur Jenderal KKP disajikan pada Lampiran 1.

D.PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN INSPEKTORAT IV

Terhadap kegiatan yang telah ditetapkan di atas, dijabarkan lagi dalam beberapa komponen kegiatan, yaitu:

1. Reviu Laporan Keuangan;
2. Reviu RKA-K/L (Penganggaran);
3. Reviu Pengendalian Intern Pelaporan Keuangan (PIPK);
4. Pengawasan Pengadaan Barang/Jasa;
5. Pengawasan Pertanggungjawaban Keuangan;
6. Pemantauan TL Hasil Pengawasan Itjen dan BPK-RI;
7. Evaluasi PNBP;
8. Pengawasan Manajemen Risiko;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

9. Evaluasi Maturitas SPIP;
10. Evaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK;
11. Pemantauan TL Rencana Aksi RB;
12. Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan;
13. PTL Penanganan Benturan Kepentingan;
14. Reviu Laporan Kinerja;
15. Pengawasan SAKIP;
16. Pengawasan pelaksanaan kegiatan prioritas/strategis;
17. Pengawasan Pengelolaan BMN;
18. Evaluasi Pengendalian Mutu Pengawasan;

A. RENCANA AKSI PENCAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA

Untuk mencapai sasaran kinerja sesuai harapan, diperlukan perencanaan kinerja yang matang dan terukur. Itjen KKP telah menyusun sebuah Rencana Aksi Kinerja berdasarkan Penetapan Kinerja yang telah diperjanjikan untuk memberikan informasi dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pencapaian sasaran kinerja. Rencana Aksi Kinerja ini memberi informasi mengenai jenis dan waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun berjalan untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan kegiatan tersebut menuju pencapaian sasaran kinerja .

Dengan adanya Rencana Aksi diharapkan setiap unit kerja di lingkungan Itjen KKP dapat melaksanakan pencapaian kinerja melalui pelaksanaan kegiatan yang terarah dan terukur sesuai rencana aksi yang telah ditetapkan. Rincian Rencana Aksi Kinerja Pencapaian Target Indikator Kinerja TA 2025 disajikan pada Lampiran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGELOLAAN KINERJA INSPEKTORAT IV

Pengelolaan kinerja merupakan sistem manajemen yang dilakukan organisasi di dalam mencapai sasaran kinerja yang diharapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, Tim pengelola kinerja Inspektorat IV melaksanakan pengumpulan data kinerja, kemudian mengukur, dan mengevaluasi perkembangan capaian kinerja secara berkala (triwulan). Hasil pengukuran tersebut akan memberikan gambaran tingkat keberhasilan dan hambatan dalam pencapaian seluruh sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Data capaian kinerja diolah dan disajikan dalam aplikasi manajemen kinerja berbasis website di *kinerjaku.kkp.go.id* dengan kategorisasi (penentuan posisi). Tingkat penilaian capaian kinerja disajikan pada Tabel 4:

Tabel 4 Penilaian Capaian Kinerja

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

B. CAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT IV

Capaian kinerja Inspektorat IV TA 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan program/kegiatan Inspektorat IV yang dilaksanakan dari bulan Januari s.d. Desember 2025 yang terdiri dari 2 (tiga) Sasaran Kegiatan dan 7 (tujuh) Indikator Kinerja. Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target dengan realisasi Indikator Kinerja sesuai dengan Perjanjian Kinerja pada TA 2025.

Berdasarkan pengukuran kinerja dengan menggunakan aplikasi pengelolaan kinerja (*kinerjaku.kkp.go.id*), Capaian kinerja Inspekorat IV TA 2025 disampaikan sebagaimana pada Gambar 2:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Gambar 2 Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV TA 2025

Berdasarkan pada Gambar 2 di atas, Nilai Kerja Organisasi (NKO) yang didapatkan Inspektorat IV TA 2025 adalah sebesar **112,30% (kategori Istimewa)**. Secara rinci capaian indikator Kinerja Kegiatan Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 5 Capaian Indikator Kinerja Inspektorat IV TA 2025

Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target	Realisasi (%)	Capaian (%)	
					Riil	Aplikasi
Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤0,5	0,18	164	120
	2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86	89,55	104,13	104,13
	3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	85	91,94	108,16	108,16
	4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4	2	200	120
Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85	95,54	112,4	120
	6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	80	92,7	114,63	114,63
	7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100	100	100	100

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Berdasarkan aplikasi kinerjaku diperoleh dari nilai Sasaran Kinerja, yaitu:

1. SK.01 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV, dengan capaian 111,85%; dan
2. SK.02 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV, dengan capaian 112,75%.

Penjelasan hasil pengukuran Indikator Kinerja TA 2025 adalah sebagai berikut:

SK-1 Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV

Sasaran Kegiatan Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV ditetapkan sebagai tolok ukur manfaat (outcome) yang diharapkan dapat dihasilkan dari pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen sebagai APIP dengan fokus pada peningkatan kualitas tata kelola di lingkungan KKP. Tata kelola yang baik merupakan hal yang sangat penting dan fundamental dalam setiap program/kegiatan pembangunan. Dengan tata kelola yang baik, setiap program/kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan dapat berjalan secara akuntabel, efektif, dan efisien sehingga dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Untuk itu, sesuai dengan fungsinya, Inspektorat IV menjadikan Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra sebagai Sasaran kegiatan dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Kelautan dan Perikanan. Hal ini juga sejalan dengan PP 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang menerangkan bahwa salah satu fungsi APIP adalah Memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Dalam pelaksanaannya, upaya Inspektorat IV dalam mendorong terwujudnya Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra diukur dan dipertanggungjawabkan melalui capaian 4 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana berikut.

IKU 1 - Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV

Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV adalah jumlah nilai temuan keuangan (nilai Tuntutan Ganti Rugi) dari hasil pemeriksaan BPK pada Laporan Keuangan Unit Eselon I (mitra) Tahun 2024

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

dibandingkan dengan realisasi anggaran Unit Eselon I tahun 2024 (mitra). Realisasi IKU ini menggunakan nilai temuan keuangan atas hasil pemeriksaan BPK RI yang dilaksanakan dalam waktu satu tahun, sehingga frekuensi pengukuran IKU ini bersifat tahunan dan diukur dengan menggunakan polarisasi Minimize (semakin kecil lebih baik). Target IKU 1 tahun 2025 adalah ≤ 0,5% dan diukur secara tahunan (Triwulan III). Capaian indikator kinerja utama Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 6 Perkembangan Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)

IKU 1 - Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)									
Realisasi Tahun				Tahun 2025			% Progress 2024-2025	Renstra Itjen 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
0,02	0,11	0,11	0,15	0,50	0,18	164,00	120,00	0,50	164,00

IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV pada tahun 2025 terealisasi sebesar 0,18% dari target ≤ 0,50% atau 164,00% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku). Indikator kinerja ini diukur dengan menggunakan polarisasi Minimize (semakin kecil lebih baik), apabila dilihat dari capaian tahun-tahun sebelumnya capaian indikator ini mengalami penuruan seperti dibandingkan dari tahun lalu mengalami penurunan sebesar 20%, penurunan capaian dipengaruhi oleh bertambahnya nilai temuan pada mitra ditahun 2025. Jika dibandingkan dengan target perencanaan jangka menengah capaian pada tahun 2025 capaian indikator ini sudah melebihi target jangka menengah sebesar 164,00%. Rincian realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV Tahun 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 7 Realisasi IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)

No	Unit Kerja	Realisasi Anggaran (Rp)	Nilai Temuan BPK (Rp)	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Ditjen PDSPKP	324.896.904.773	1.160.724.332	<0,5%	0,36%	128%
2	BPPMHKP	324.873.963.088	-	<0,5%	~%	~%
Total		**649.770.867.861**	**1.160.724.332**	**<0,5%**	**0,18%**	**164%**

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain di lingkup Inspektorat Jenderal, pencapaian IKU Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra telah memenuhi target sesuai dengan capaian masing-masing unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

eselon II lainnya. Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target indikator kinerja ini diantaranya:

1. Reviu Laporan Keuangan;
2. Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran;
3. Reviu Penyerapan Anggaran dan Realisasi Pengadaan Barang/Jasa (PBJ);
4. Pengawasan Implementasi Program P3DN;
5. Pengawasan PBJ, diantaranya:
    a. Pembangunan Sentra Kuliner Ikan;
    b. Pembangunan Pasar Ikan Bersih;
    c. Pembangunan Unit Pengolahan Ikan Bernilai Tambah dalam Kawasan Perikanan Terpadu;
    d. Pembangunan Pabrik Es;
    e. Pengadaan Mobil ATI;
    f. Pembangunan Gudang Beku *Portable*;
    g. Pengadaan Sarana Pasca Panen;
    h. Pengadaan Peralatan Pengolahan;
    i. Pengadaan Kendaraan Berpendingin.
6. Pengawasan BMN, diantaranya:
    a. Reviu Rencana Kebutuhan BMN
    b. Evaluasi Penggunaan BMN
    c. Pendampingan Pelaksanaan BMN
    d. Pemantauan TL Hasil Pemeriksaan BPK RI;
7. Pemantauan Pertanggungjawaban Keuangan;
8. Audit Kinerja;
9. Evaluasi PNBP.

IKU 2 – Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)

Indikator Kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup Mitra Inspektorat IV merupakan Indikator Kinerja yang baru ditetapkan pada tahun 2025. Indikator kinerja ini bertujuan agar Tata kelola Pemerintahan yang efektif dan akuntabel dalam koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan mitra Inspektorat IV.

Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat implementasi reformasi birokrasi lingkup PDSPKP dan BPPMHKP berdasarkan persentase capaian 12 (dua belas) Indikator Kinerja Mandatori (IKM) Mitra Tahun 2025. Indikator Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP merupakan indikator yang baru ditetapkan di tahun 2025. Berdasarkan Nota Dinas Kepala Biro Sumber Daya Manusia Aparatur dan Organisasi Nomor 87/SJ.3/0T.720/I/2026 Perihal Capaian Indikator Kinerja Mandatory Nilai Implementasi Reformasi Birokrasi Unit Organisasi Eselon I Tahun 2025, mitra inspektorat IV yaitu Ditjen PDSPKP memiliki capaian nilai 90,59 dan BPPMHKP memiliki capaian nilai 88,50 sehingga capaian Inspektorat IV adalah sebesar 89,55. Capaian indikator kinerja utama Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 8 Perkembangan Realisasi IKU Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)

IKU 2 - Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)									
Realisasi Tahun				Tahun 2025			% Progress 2024-2025	Renstra Itjen 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
-	-	-	-	86,00	89,55	104,13	-	88,00	101,76

Pada tahun 2025, Inspektorat IV menetapkan target Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup PDSPKP dan BPPMHKP sebesar 86% yang diukur secara tahunan pada Triwulan IV Tahun 2025. Berdasarkan Nilai Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi per Unit Eselon I Tahun 2025 dari Biro Perencanaan, Inspektorat IV mendapatkan capaian nilai sebesar 89,55 yang berasal dari capaian Nilai Implementasi RB Ditjen PDSPKP dan IKU ini merupakan IKU baru pada tahun 2025 sehingga tidak bisa dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sudah melebihi target jangka menengahnya sebesar 101,76%. Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain di lingkup Inspektorat Jenderal, pencapaian IKU Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra seluruh eselon II telah memenuhi target sesuai dengan capaian masing-masing unit eselon II lainnya.

Upaya yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian indikator kinerja Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi (RB) lingkup KKP adalah melakukan pengawasan secara berkala atas rencana aksi RB KKP Tahun 2025 yang telah

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

ditetapkan.

Pengawasan yang telah dilakukan dalam bentuk kegiatan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi (RB) sampai dengan Triwulan III Tahun 2025 pada eselon II lingkup mitra Inspektorat IV sesuai dengan 1.) Surat Tugas Nomor B.138/ITJ.4/KP.440/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Perihal Melaksanakan evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2025 pada Biro SDMAO dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan, 2.) Surat Tugas Nomor B.139/ITJ.4/KP.440/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2025 pada Pusdatin, Biro Hukum, dan Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal KKP, BPPSDM, dan BPPMHKP, 3.) Surat Tugas Nomor B.140/ITJ.4/KP.440/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan I Tahun 2025 pada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, serta Inspektorat V dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengelolaan Kelautan, dan Ditjen Penataan Ruang Laut, 4.) Surat Tugas Nomor B.290/ITJ.4/KP.440/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2025 pada Biro SDMAO dan Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta, 5.) Surat Tugas Nomor B.291/ITJ.4/KP.440/IX/2025 Tanggal 18 September 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2025 pada Pusdatin, Biro Hukum, dan Biro Umum dan PBJ Sekretariat Jenderal KKP, BPPSDM, dan BPPMHKP di Provinsi DKI Jakarta 6.) Surat Tugas Nomor B.292/ITJ.4/ KP.440/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan II Tahun 2025 pada Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, serta Inspektorat V dan Sekretariat Inspektorat Jenderal, Ditjen Perikanan Budidaya, Ditjen Pengelolaan Kelautan, dan Ditjen Penataan Ruang Laut di Provinsi DKI Jakarta 7.) Surat Tugas Nomor B.434/ITJ.4/KP.440/V/2025 Tanggal 25 November 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 pada Biro SDMAO, Biro Perencanaan Sekretariat Jenderal KKP, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap di Provinsi DKI Jakarta, 8.) Surat Tugas Nomor B.435/ITJ.4/KP.440/V/2025 Tanggal 25 November 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 pada

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Biro Keuangan, Sekretariat Jenderal, serta Inspektorat V dan Sekretariat Inspektorat Jenderal di Provinsi DKI Jakarta, 9.) Surat Tugas Nomor B.436/ITJ.4/KP.440/V/2025 Tanggal 25 November 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 pada Pusdatin, Biro Hukum Sekretariat Jenderal KKP dan BPPMHKP di Provinsi DKI Jakarta, 10.) Surat Tugas Nomor B.437/ITJ.4/ KP.440/V/2025 Tanggal 25 November 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 pada Biro Umum, Biro PBJ Sekretariat Jenderal KKP dan BPPSDM di Provinsi DKI Jakarta, 11.) Surat Tugas Nomor B.438/ITJ.4/KP.440/V/2025 Tanggal 25 November 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 pada Ditjen Perikanan Budidaya, dan Ditjen Pengelolaan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta, 12.) Surat Tugas Nomor B.439/ITJ.4/KP.440/V/2025, tanggal 25 November 2025 Perihal Melaksanakan Evaluasi Capaian Reformasi Birokrasi Triwulan III Tahun 2025 pada Ditjen Penataan Ruang Laut dan Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan di Provinsi DKI Jakarta.

IK 3 - Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)

Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang terbit pada Triwulan IV Tahun 2024 s.d. Triwulan III Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah Tuntas) oleh Mitra Inspektorat IV yang menjadi objek pengawasan dan pengukuran. Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2025 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025”, realisasinya Lingkup Mitra Inspektorat IV TA 2025 adalah sebesar 91,94% (tuntas 422 dari 459 rekomendasi) dari target 85% atau tercapai 108,16% dari target. Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 9 Perkembangan Realisasi IKU Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)

IKU 3 - Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)									
Realisasi Tahun				Tahun 2025			% Progress 2024-2025	Renstra Itjen 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
97,85	95,22	95,62	95,79	85,00	91,94	108,16	95,98	89,00	103,30

IKU Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV pada tahun 2025 terealisasi sebesar 91,94% dari target 85% atau 108,16%. Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV TA 2025 mengalami penurunan sebanyak 4,02 dari tahun sebelumnya. Penurunan realisasi indikator ini disebabkan cukup banyak rekomendasi manajerial yang belum tuntas ditindaklanjuti oleh mitra Inspektorat IV. Walaupun demikian, masih dilakukan pemantauan tindak lanjut untuk sisa temuan yang belum tuntas. Apabila dibandingkan dengan target jangka menengah sudah melebihi target jangka menengahnya sebesar 103,30%.

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 60/ITJ.0/RC.610/I/2026 perihal Capaian IKU “Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Unit Eselon I Lingkup KKP” Tahun 2025, realisasi Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV TA 2025 adalah sebesar 91,94% (tuntas 422 dari 459 rekomendasi) dari target 85% atau tercapai 108,16%. Hal ini disebabkan oleh mitra Inspektorat IV telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pengawasan yang telah diberikan oleh inspektorat IV yang kemudian dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja organisasinya. Secara rinci, realisasi pemanfaatan rekomendasi hasil pengawasan Itjen per unit mitra Inspekorat IV disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 10 Realisasi IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra Inspektorat IV

No	Unit Kerja	Target (%)	Jumlah Rekomendasi	Tindak Lanjut (Tuntas)	Realisasi (%)	Capaian (%)
1	Ditjen PDSPKP	85	227	224	98,68	116,09
2	BPPMHKP	85	232	198	85,34	100,41
Total		85	459	422	91,94	108,16

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain di lingkup Inspektorat Jenderal, pencapaian IKU Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja Lingkup Mitra seluruhnya telah mencapai target sesuai dengan capaian masing-masing unit eselon II lainnya. Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU antara lain Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Itjen terhadap mitra dan Koordinasi/Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan baik secara internal maupun eksternal Itjen KKP dan percepatan pemantauan tindak lanjut secara elektronik melalui aplikasi SIDAK.

IKU 4 - Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)

Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV merupakan jumlah rekomendasi Inspektorat IV yang diberikan kepada seluruh mitra yang menjadi objek pengawasan dapat berupa kajian yang berisi saran untuk melakukan perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya. Melalui rekomendasi perbaikan kebijakan ini, Inspektorat IV sebagai advisory service sebagai upaya untuk penguatan tata kelola pelaksanaan program/kegiatan mitra. Target IKU 4 TA 2025 adalah 4 rekomendasi yang diukur secara semesteran. Capaian IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 11 Perkembangan Realisasi IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV

IKU 4 - Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)									
Realisasi Tahun				Tahun 2025			% Progress 2024-2025	Renstra Itjen 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
4,00	4,00	7,00	4,00	4,00	8,00	200,00	200,00	18,00	44,44

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, realisasi IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) rekomendasi kebijakan lingkup mitra Inspektorat IV dari target 4 (empat) rekomendasi atau dengan capaian 200% (nilai maksimal 120% pada aplikasi kinerjaku). Perlu disampaikan bahwa target indikator kinerja ini ditetapkan target pada angka yang

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

sama setiap tahunnya (*stabilized*) dari 2025-2029. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya indikator kinerja ini mengalami peningkatan 100% dari tahun 2024. Peningkatan capaian dipengaruhi oleh semakin banyak saran ataupun rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada mitra inspektorat IV. Realisasi IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2029 atau akhir perencanaan jangka menengah maka capaian telah melebihi sebesar 120% dari target.

Jumlah rekomendasi perbaikan kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV TA 2025 sebanyak 8 (delapan) dengan rincian sebagai berikut:

1. Rekomendasi Kebijakan terkait Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Lingkup Ditjen PDSPKP;
2. Saran atas Usulan Rancangan Peraturan Presiden tentang Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan;
3. Hasil Diskusi Penataan Organisasi UPT lingkup BPPMHKP;
4. Masukan atas Hasil Diskusi Sertifikasi Mutu Produksi Primer dan Pascapanen lingkup BPPMHKP Pasca Terbitnya Permen KP Nomor 6 Tahun 2025;
5. Penyampaian Hasil Telaah/Masukan Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sektor Kelautan dan Perikanan;
6. Rekomendasi Kebijakan Terkait Budidaya Lobster;
7. Penyampaian Hasil Telaah Terhadap Draft Peraturan Kepala Badan Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Bulan Mutu Tahun 2025;
8. Pertimbangan atas Konsep Perjanjian Kerja Sama antara BPPMHKP dan AP5I dalam Rangka Mendorong Ekspor Produk Udang Indonesia.

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain di lingkup Inspektorat pencapaian IKU Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan lingkup Mitra Inspektorat IV sesuai dengan capaian masing-masing unit eselon II lainnya. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja ini melalui:

a. peningkatan kualitas saran/rekomendasi yang diberikan kepada mitra (Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP); dan
b. pelaksanaan kajian/evaluasi/reviu atas kebijakan mitra (Ditjen PDSPKP dan BPPMHKP).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target adalah secara aktif memberikan masukan atas perubahan/penambahan/penyempurnaan pada penyusunan dan/atau pelaksanaan peraturan, pedoman program/kegiatan, rencana kinerja, rancangan kerja sama aktivitas strategis, dan kebijakan dalam bentuk lainnya pada mitra Inspektorat IV.

SK-2 Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Efektif lingkup Inspektorat IV

Pengawasan intern yang handal merupakan salah satu prinsip dalam tata kelola kepemerintahan yang baik. Dalam sebuah manajemen organisasi, pengawasan intern memegang peran penting dalam mendukung keberhasilan pencapaian kinerja organisasi. Beberapa fungsi utama pengawas intern dalam organisasi yaitu:

1. Mengendalikan pelaksanaan program/kegiatan pembangunan agar sesuai dengan rencana dan tujuan.
2. Mengawal pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi agar berjalan sesuai dengan tata kelola yang baik dan berintegritas (*good governance*).
3. Melakukan tindakan atas terjadinya penyimpangan atau pelanggaran peraturan dan norma.
4. Mendorong implementasi kebijakan pemerintah/nasional sesuai dengan sasaran.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV, diperlukan suatu ukuran-ukuran yang dapat menggambarkan kualitas dari pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan kepada mitra Inspektorat IV. Karena itu, Inspektorat IV menetapkan “Pengawasan Intern yang Handal pada Mitra Inspektorat IV” sebagai sasaran Kegiatan kedua sebagai ukuran kualitas pengawasan yang diukur melalui pencapaian 3 Indikator Kinerja Kegiatan dengan rincian sebagai berikut.

IKU 5 – Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)

Telaah Sejawat adalah kegiatan penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat terhadap Inspektorat lain lingkup itjen KKP. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa pelaksanaan audit sesuai dengan standar pengawasan intern. Nilai telaah sejawat inspektorat diperoleh dari hasil kegiatan telaah sejawat antar inspektorat lingkup itjen yang dilaksanakan pada tahun 2025 dengan menggunakan kerangka

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

penilaian yang disepakati. Telaah Sejawat Internal dilaksanakan secara berkala untuk menilai kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern terhadap standar serta mengevaluasi kualitas pengawasan, meningkatkan kapabilitas dan meningkatkan efektivitas, efisiensi dan nilai tambah kegiatan pengawasan. Target IKU ini pada tahun 2025 adalah sebesar 85 yang diukur secara tahunan pada triwulan II.

Capaian IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 12 Perkembangan Realisasi IKU Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV

IKU 5 - Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)									
Realisasi Tahun				Tahun 2025			% Progress 2024-2025	Renstra Itjen 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
-	-	-	-	85,00	95,54	112,40	-	87,00	109,82

Pengukuran capaian kinerja berdasarkan Memorandum Inspektur IV Nomor 101/ITJ.4/HP.550/V/2025, tanggal 26 Mei 2025, hal Laporan Pelaksanaan Telaah Sejawat Internal Inspektorat Jenderal Tahun 2025, diketahui bahwa hasil telaah sejawat Inspektorat IV memperoleh nilai 95,54 melebihi target yang telah ditetapkan sebesar 85,00 atau 112,40%. Indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan periode tahun 2024 atau tahun-tahun sebelumnya, dikarenakan Indikator Kinerja Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai) merupakan Indikator Kinerja baru, sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target jangka menengah dengan target 87%, telah melampaui target sebesar 109,82%.

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain di lingkup Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV berada di posisi kedua dalam memenuhi nilai tingkat kesesuaian dengan standar, dan pencapaian IKU Jumlah Nilai Hasil Telaah Sejawat seluruh Inspektorat telah mencapai target sesuai dengan capaian masing-masing unit eselon II lainnya. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh kesesuaian pelaksanaan pengawasan intern yang dinilai, yaitu:

a) Standar Atribut yang terdiri dari aspek independensi dan objektivitas auditor, dan kecakapan dan kecermatan profesional auditor.peningkatan kopetensi Auditor; dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengawasan.
b) Standar Kinerja yang terdiri dari aspek pengelolaan pengawasan intern,perencanaan penugasan, pelaksanaan penugasan, komunikasi hasil penugasan, pemantauan tindak lanjut, dan komunikasi penerimaan risiko.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

IKU 6 - Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%)

Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat IV (%) merupakan sebuah ukuran dari implementasi pemanfaatan sistem informasi dalam membantu dan mendukung tugas pelaksanaan pengawasan intern oleh unit kerja lingkup Itjen KKP. Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan Lingkup Inspektorat diukur berdasarkan tingkat pemanfaatan aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) dalam hal kepatuhan penyampaian (upload) Laporan Hasil Pengawasan (LHP) (bobot 50%) serta tingkat pemanfaatan aplikasi SIDAK dalam hal kepatuhan dalam hal input data hasil pengawasan (bobot 50%).

Pengukuran capaian IKU dilaksanakan secara semesteran dan capaian kinerja yang berdasarkan pemanfaatan aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) pada triwulan II tahun 2025 memiliki hasil sebesar 100% dari target 80%. Adapun capaian diukur berdasarkan pemenuhan kewajiban/kepatuhan implementasi pemanfaatan aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) seperti dalam memorandum ketua tim kerja system informasi pengawasan Nomor 21/ITJ.0/TU.210/I/2026 tentang Capaian IKU Persentase Implementasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan target (realisasi kinerja triwulan IV 2025, target triwulan triwulan II 2025, realisasi triwulan II 2024 dan target tahun 2025) dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 13 Perkembangan Realisasi IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV

IKU 6 - Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)									
Realisasi Tahun				Tahun 2025			% Progress 2024-2025	Renstra Itjen 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
-	-	-	-	80,00	91,70	114,63	-	88,00	104,20

Data di atas menunjukan bahwa capaian indikator kinerja TA 2025 sebesar 91,70% (114,63,%) telah melampaui target sebesar 80%, dan tidak dapat dibandingkan periode TA. 2024, dikarenakan Indikator Kinerja Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan merupakan Indikator Kinerja baru. Sedangkan apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target jangka menengah dengan target 88%, telah melampaui target sebesar 104,20%.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain di lingkup Inspektorat Jenderal, Inspektorat IV ada di posisi ketiga dalam pencapaian IKU Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan dan pencapaian IKU seluruh Inspektorat telah mencapai target sesuai dengan capaian masing-masing unit eselon II lainnya. Keberhasilan capaian kinerja ini didukung oleh efektifitas dalam pelaksanaan kegiatan untuk pencapaian indikator kinerja ini melalui kepatuhan penyampaian (*upload*) laporan hasil kegiatan sesuai dengan surat tugas yang diterbitkan pada periode waktu pengukuran.

IKU 7 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)

Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV adalah Tingkat kepatuhan terhadap pengelolaan kinerja di lingkungan Inspektorat IV yang berjalan secara tertib dan sesuai aturan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat IV. Pengukuran IKU 7 diukur dari ketertiban (kesesuaian format dan waktu pelaporan) dalam pemenuhan beberapa hal berikut: 1) Pengisian aplikasi e-monev Bappenas, 2) Pengisian data capaian kinerja pada aplikasi pengelolaan kinerja KKP, 3) Penyampaian Data Laporan Kinerja Interim (Triwulanan), 4) Penyampaian Data Capaian Kinerja Tahunan kepada Sekretaris Itjen dan 5) Penyampaian Data Laporan Ikhtisar Hasil Pengawasan (Tahunan). Target IKU 12 adalah 100% dan diukur secara Triwulan. Perkembangan realisasi Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 14 Perkembangan Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV

IKU 7 - Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)									
Realisasi Tahun				Tahun 2025			% Progress 2024-2025	Renstra Itjen 2025-2029	
2021	2022	2023	2024	Target	Realisasi	% Capaian		Target 2029	% Capaian thdp Target 2029
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Perlu disampaikan bahwa target IKU 7 yang ditetapkan pada angka yang sama setiap tahunnya (*stabilized*) dari Tahun 2025-2029. Realisasi IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat Tahun 2025 sebesar 100% dari target 100% atau dengan capaian 100%. Realisasi IKU Persentase Tingkat

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV jika dibandingkan dengan target 2024 atau tahun-tahun sebelumnya diperoleh capaian yang sama setiap tahunnya. Begitu juga apabila realisasi tahun 2025 dibandingkan target jangka menengah dengan target 100%, masih stabil dengan capaian 100%.

Jika dibandingkan dengan capaian unit Eselon II lain di lingkup Inspektorat Jenderal, pencapaian IKU Tingkat Kepatuhan Terhadap Pengelolaan Kinerja seluruh Inspektorat telah mencapai target sesuai dengan capaian masing-masing unit eselon II lainnya.

Upaya yang dilakukan Inspektorat IV dalam pencapaian target IKU 7 adalah melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Pengelolaan Kinerja lingkup Inspektorat IV secara berkala (triwulan).

C. ANALISIS PENGELOLAAN SUMBERDAYA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran Kegiatan

Kegiatan Pengawasan Akuntablitas Aparatur pada unit kerja mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP TA 2025 dengan sumber daya anggaran sebesar Rp 1.283.823.628,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran sebesar Rp 1.283.829.000,00. Secara rinci realisasi anggaran Inspektorat IV disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 15 Realisasi Anggaran Inspektorat IV TA 2025

Kode	Kegiatan	Pagu (Rp)			Realisasi	
		Awal	Revisi (Blokir Anggaran)	Pasca Relaksasi	Nilai (Rp)	%
2335.EBD.965 Layanan Audit Internal						
57	Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV	2.048.313.000	279.233.000	279.233.000	279.231.430	99,99
58	Pengawasan Kegiatan Prioritas/ Strategis Mitra Inspektorat IV	2.504.890.000	28.678.000	28.678.000	28.676.913	99,99
61	Kerja Sama dan Sinergi Pengawasan Intern			975.918.000	975.915.285	99,99
TOTAL		**4.553.203.000**	**307.911.000**	**1.283.829.000**	**1.283.823.628**	**99,99**

Berdasarkan Tabel diatas, realisasi anggaran Inspektorat IV TA 2025 dengan hasil sangat baik, hal ini diperlihatkan dengan realisasi anggaran mencapai 99,99%. Jika dibandingkan dengan persentase realisasi anggaran tahun sebelumnya, realisasi anggaran TA 2025 sama dengan TA. 2024 yaitu sebesar 99,99%. Perkembangan realisasi anggaran Inspektorat IV dalam 5 (lima) tahun terakhir disajikan pada Tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 16 Perkembangan Pagu dan Realisasi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2021-2025

Tahun	Pagu (Rp)	Realisasi	
		Nilai (Rp)	%
2021	3.518.934.000	3.517.106.388	99,95
2022	4.123.931.000	4.123.339.487	99,99
2023	4.684.709.000	4.684.654.255	99,99
2024	5.644.765.000	5.644.756.906	99,99
2025	1.283.829.000	1.283.823.628	99,99

2. Realisasi Anggaran Sasaran Kegiatan

Sebagaimana dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, upaya untuk mewujudkan tujuan Inspektorat IV TA 2025 yang dilaksanakan melalui pencapaian dua Sasaran Kegiatan yang diukur keberhasilannya dengan 7 indikator kinerja kegiatan. Sebagai implementasi kinerja berbasis anggaran, maka anggaran Inspektorat IV dirancang untuk mencapai target seluruh indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan sebagai parameter tercapainya sasaran kegiatan dan tujuan.

Perlu disampaikan bahwa struktur anggaran pengawasan Itjen dalam mencapai target indikator kinerja kegiatan memiliki karakteristik tersendiri. *Output* kegiatan pengawasan adalah Laporan Hasil Pengawasan yang ruang lingkup pengawasan meliputi pengawasan pengelolaan keuangan, akuntabilitas manajemen kinerja, reformasi birokrasi, dan tema lainnya sehingga kegiatan pengawasan yang dilaksanakan dalam pencapaian indikator yang ditetapkan dapat mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan dan sasaran kegiatan yang lain. Informasi keuangan terkait dengan pencapaian Sasaran Kegiatan Inspektorat IV TA 2025 disajikan pada Tabel berikut:

Tabel 17 Pagu dan Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan Inspektorat IV Tahun 2025

Kode	Sasaran Kegiatan	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
SK.1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	307.911.000	307.908.343	99,99
SK.2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	975.918.000	975.915.285	99,99
Total		1.283.829.000	1.283.823.628	99,99

3. Analisis Kualitas Pelaksanaan Anggaran

Organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktifitasnya. *Value for money* merupakan salah satu indikator kinerja yang memberikan informasi apakah anggaran (dana) yang dibelanjakan menghasilkan suatu nilai tertentu bagi para pemangku kepentingan (*stakeholders*),

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

indikator yang dimaksud adalah ekonomis, efisien, dan efektif. Pada proses pengukuran, indikator efektivitas dalam *value for money* berorientasi pada hasil dan lebih bersifat kualitatif, sedangkan indikator ekonomis dan efisien lebih berorientasi pada proses dan lebih bersifat kuantitatif. Kriteria yang digunakan untuk mengukur *value for money* adalah:

1. Ekonomis: pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomis terkait dengan sejauh mana organisasi dapat meminimalisir sumber daya anggaran yang digunakan, yaitu dengan menghindari pengeluaran yang boros dan tidak produktif.
2. Efektivitas: tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan.
3. Efisiensi: pencapaian output yang optimal dengan penggunaan sumber daya anggaran seminimal mungkin. Dengan kata lain, efisiensi merupakan perbandingan antara realisasi *output* dengan input (anggaran) yang dikaitkan dengan target yang telah ditetapkan.

Dengan mengacu pada kriteria di atas, dapat disampaikan bahwa anggaran yang dialokasikan untuk mendukung tugas dan fungsi Inspektorat IV telah dikelola dengan ekonomis, efektif dan efisien dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Ekonomis

   Pengelolaan anggaran Inspektorat IV telah dilaksanakan secara ekonomis mulai dari tahap perencanaan. Penyusunan anggaran dilaksanakan dengan mengacu kepada sasaran dan target kinerja Inspektorat IV yang direviu oleh auditor internal yang ditugaskan untuk memastikan rancangan anggaran telah sesuai dengan sasaran dan target kinerja, ketentuan yang berlaku, dan ekonomis. Selain itu, dalam penyusunan rencana kegiatan pengawasan, Inspektorat IV menggunakan pendekatan pengawasan berbasis risiko sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Itjen menjadi lebih fokus dan tepat sasaran. Selanjutnya, dalam tahap pelaksanaan, pengelolaan anggaran Inspektorat IV diawasi secara berkala oleh auditor internal untuk memastikan organisasi mendapatkan barang, jasa, dan SDM kualitas terbaik dengan biaya sekecil mungkin.
2. Efektif

   Berdasarkan pengukuran kinerja TA 2025, dari 7 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, sebanyak 6 Indikator Kinerja dapat dicapai melebihi target dan 1 Indikator Kinerja lainnya tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan. Dengan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

capaian Indikator Kinerja tersebut, nilai rata-rata pencapaian sasaran dan target kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 yang ditunjukan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 112,30% atau diatas target yang diharapkan. Dengan membandingkan tingkat pencapaian indikator kinerja kegiatan dengan target yang ditetapkan pada TA 2025, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan anggaran Inspektorat IV terkelola dengan efektif. Tercapainya tingkat efektivitas kinerja tersebut tidak lepas dari adanya pengendalian proses pencapaian target kinerja yang dilaksanakan secara sistematis dan periodik oleh pimpinan, auditor dan beserta tim pengelola kinerja Inspektorat IV.

3. Efisien

Tingkat efisiensi atas pelaksanaan anggaran Inspektorat IV TA 2025 dapat dilihat dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran dengan capaian kinerja yang meliputi capaian *output* dan capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO). Secara keseluruhan, pengelolaan anggaran Inspektorat IV dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2025 dapat dinilai efisien karena dengan dengan input anggaran yang lebih kecil (99,9999%) dapat dihasilkan kinerja yang sesuai dan melebihi target (112,30%). Rincian efisiensi anggaran per jenis capaian kinerja disampaikan sebagai berikut:

a. Efisiensi Capaian Kinerja *Output*

Berdasarkan perbandingan antara realisasi anggaran dengan *output* yang dihasilkan, diketahui bahwa realisasi anggaran Inspektorat IV Tahun 2024 sebesar 99,99% sedangkan capaian *output* Inspektorat IV mencapai 100% sehingga terdapat efisiensi sebesar 0,0001% dalam menghasilkan *output* dengan optimal.

b. Efisiensi Capaian Kinerja Organisasi

Bila dibandingkan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Inspektorat IV TA 2025, diketahui bahwa sumber daya anggaran Inspektorat IV digunakan secara efisien karena dengan input anggaran yang lebih kecil (99,9999%) dapat menghasilkan kinerja yang melebihi target (NPSS: 112,30%). Dengan demikian, efisiensi anggaran atas pencapaian kinerja Inspektorat IV sebesar 12,30%.

Efisiensi anggaran Inspektorat IV per jenis capaian kinerja yang disajikan pada Tabel berikut:

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tabel 18 Efisiensi Anggaran Inspektorat IV Tahun 2025 Per Jenis Capaian Kinerja

Realisasi Anggaran (*Input*)	**Realisasi Hasil**		**Efisiensi**
99,99% Dari alokasi anggaran Rp 1.283.823.628	*Output*	99,9999%	0,0001%
	Nilai Kinerja Organisasi (NKO)	112,30%	12,30%

Pencapaian efisiensi anggaran terebut merupakan hasil dari optimalisasi hari pengawasan yaitu dengan menggabungkan beberapa subjek pengawasan (yang memungkinkan), pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan (pengawasan secara daring/*online*/desk) dan penerapan pengawasan berbasis resiko yang memungkinkan pengawasan pada mitra Inspektorat IV menjadi lebih tepat sasaran.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran dan evaluasi kinerja Inspektorat IV TA 2025 antara lain:

1. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja melalui aplikasi manajemen kinerja KKP (*kinerjaku.kkp.go.id*), dapat disampaikan bahwa capaian kinerja Inspektorat IV TA 2025 cukup memuaskan. Hal ini ditunjukan dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) atau nilai rata-rata kinerja organisasi yang mencapai 112,30% atau istimewa;
2. Nilai Kinerja Organisasi (NKO) mencapai 112,30% (Istimewa), dengan rincian dari 7 Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan, dengan hasil sebanyak 6 IKU melebihi target yang ditetapkan (>100%), dan 1 IKU tercapai sesuai target (100);
3. Dari sisi kinerja keuangan, realisasi anggaran Inspektorat IV TA 2025 dengan hasil yang sangat baik yaitu sebesar Rp 1.283.823.628,00 atau 99,99% dari alokasi anggaran Rp 1.283.829.000,00. Jika realisasi tersebut dibandingkan dengan nilai capaian kinerja Inspektorat IV yang mencapai 112,30% maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan sumber daya anggaran Inspektorat IV cukup efisien karena dengan penggunaan anggaran yang lebih kecil/sedikit dapat menghasikan capaian kinerja yang lebih tinggi.

B. PERMASALAHAN

Tidak ditemukan kendala/permasalahan berarti yang dapat mempengaruhi capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja yang dilakukan pengukuran pada TA 2025 karena Inspektorat IV telah melakukan upaya-upaya dalam optimalisasi pengelolaan kinerja dan anggaran sesuai dengan perkembangan kebijakan seperti pelaksanaan pengawasan jarak jauh (daring/online).

C. RENCANA PERBAIKAN

Rencana perbaikan yang dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan pengelolaan kinerja Inspektorat IV dengan melaksanakan penyusunan program kerja pengawasan berbasis risiko dengan fokus pada program prioritas nasional dan KKP di tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

D. TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN KINERJA SEBELUMNYA

Pada Laporan Kinerja Tahun 2024 terdapat 3 (tiga) saran perbaikan berupa 1) Melaksanakan asistensi pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM dan Pemantauan Zona Integritas pada satker lingkup mitra inspektorat IV; dan 2) Menyusun rencana pengawasan yang ditetapkan dalam PKPT melalui pendekatan penilaian resiko terhadap mitra kerja dan menggunakan aplikasi AMS sebagai alat teknologi informasi dalam pelaksanaan pengawasan kegiatan, dan 3) Melakukan pembahasan terkait penyempurnaan pedoman pengawasan.

Terhadap 3 saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti berupa :

1. Sehubungan adanya reorganisasi dan belum adanya SOTK UPT BPPMHKP, maka dilakukan penilaian mendiri sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Nomor 269/BPPMHKP.1/ OT.710/I/2025 tanggal 23 Januari 2025 Perihal Pendampingan dan Penilaian Mandiri Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM lingkup Badan PPMHKP Tahun 2025 dan tanggapan dari Inspektur V melalui Nota Dinas Nomor 210/ITJ.5/KP.730/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 Perihal Tanggapan atas Permohonan Pendampingan dan Penilaian Mandiri Unit Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani lingkup Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan sesuai dengan Nota Dinas Sekretaris Inspektorat Jenderal Nomor 825/ITJ.0/KP.750/IX/2025 tanggal 4 September 2025 perihal hasil rapat pembahasan perubahan peran tim penilai internal dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi/wilayah birokrasi bersih melayani di lingkungan KKP yang menunjukkan peran TPI dalam pelaksanaan Evaluasi Pembangunan ZI pada unit kerja/satuan kerja yang diusulkan berpredikat WBK di tingkat KKP pada tahun 2025 dilakukan oleh inspektorat V,
2. Telah disusunnya PKPT sesuai dengan Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, yang kemudian disesuaikan dengan Memorandum Inspektur IV Nomor 80/ITJ.4/RC.210/IV/2025 tanggal 24 April Perihal Usulan Revisi Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA.2025 Lingkup PDSPKP dan BPPMHKP yang kemudian disahkan menjadi Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 42 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 16 Tahun 2025

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025, serta Pengusulan perubahan/revisi PKPT Tahun 2025 kepada Inspektur Jenderal melalui Sekretaris Inspektorat Jenderal pada bulan September sesuai dengan Nota Dinas Inspektur IV Nomor 184/ITJ.4/RC.210/IX/2025 Perihal Usulan Penyesuaian Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) TA 2025 Lingkup PDSPKP dan BPPMHKP pada tanggal 24 September 2025 yang kemudian disahkan menjadi Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 85 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Inspektur Jenderal Nomor 16 Tahun 2025 Tentang Kebijakan Pengawasan dan Program Kerja Pengawasan Tahunan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2025. AMS telah digunakan sebagai alat teknologi informasi dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai IKU Persentase Implementasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan yang capaiannya diukur berdasarkan pemenuhan kewajiban/kepatuhan implementasi pemanfaatan aplikasi Audit Manajemen Sistem (AMS) seperti dalam memorandum ketua tim kerja system informasi pengawasan Nomor 21/ITJ.0/TU.210/I/2026 tentang Capaian IKU Persentase Implementasi dan Fasilitasi Sistem Informasi Pengawasan Lingkup Inspektorat Jenderal Triwulan IV Tahun 2025.

3. Telah melaksanakan pembahasan terkait penyempurnaan pedoman pengawasan melalui Undangan Rapat Nomor B.1637/ITJ.0/TU.330/XI/2024 Perihal Penyusunan Pedoman (Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis) Pengawasan Intern Inspektorat Jenderal yang kemudian disahkan menjadi peraturan Inspektur Jenderal Nomor 21 Tahun 2025 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

LAMPIRAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lina Herlina
Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Tornanda Syaifullah
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 8 Januari 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Inspektur Jenderal	Inspektur IV
Tornanda Syaifullah	Lina Herlina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	85
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengawasan Akuntablitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan		**4.614.723.000**
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	
Total Anggaran Inspektorat IV Tahun 2025		**4.614.723.000**

Jakarta, 8 Januari 2025

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal

Tomanda Syaifullah

PIHAK PERTAMA
Inspektur IV

Lina Herlina

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 2. Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 bulan April

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110, KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON 021-3519070 (LACAK), FAKSIMILE 021-3522310
LAMAN *www.kkp.go.id* SUREL *itjen@kkp.go.id*

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febry Budianto
Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lotharia Latif
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 21 April 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Inspektur Jenderal	Inspektur IV
Lotharia Latif	Febry Budianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	85
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengawasan Akuntablitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan		**4.553.203.000**
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	
Total Anggaran Inspektorat IV Tahun 2025		**4.553.203.000**

Jakarta, 21 April 2025

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal

Lotharia Latif

PIHAK PERTAMA
Inspektur IV

Fepry Budianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 3. Revisi Perjanjian Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 bulan Desember

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
INSPEKTORAT JENDERAL
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3522805
LAMAN www.kkp.go.id SUREL itjen@kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Febry Budianto
Jabatan : Inspektur IV

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Ade Tajudin Sutiawarman
Jabatan : Inspektur Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2025

PIHAK KEDUA	PIHAK PERTAMA
Inspektur Jenderal	Inspektur IV
Ade Tajudin Sutiawarman	Febry Budianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
INSPEKTORAT IV

Sasaran Kegiatan		Indikator Kinerja		Target
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	1	Batas Tertinggi Nilai Temuan LHP BPK atas Laporan Keuangan Mitra Inspektorat IV (%)	≤ 0,5
		2	Persentase Implementasi Reformasi Birokrasi lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	86
		3	Persentase Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja lingkup Mitra Inspektorat IV (%)	85
		4	Jumlah Rekomendasi Perbaikan Kebijakan Lingkup Mitra Inspektorat IV (Rekomendasi)	4
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	5	Nilai Hasil Telaah Sejawat Inspektorat IV (Nilai)	85
		6	Persentase Implementasi Sistem Informasi Manajemen Pengawasan lingkup Inspektorat IV (%)	80
		7	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Kinerja dan Anggaran lingkup Inspektorat IV (%)	100

Data Anggaran:

NO	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
Pengawasan Akuntablitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan Kelautan dan Perikanan		**1.283.829.000**
1	Pengawasan Intern yang Kapabel dan Memberikan Nilai Tambah Terhadap Kinerja Mitra Inspektorat IV	
2	Tata Kelola Pengawasan Intern yang Akuntabel dan Andal lingkup Inspektorat IV	
Total Anggaran Inspektorat IV Tahun 2025		**1.283.829.000**

Jakarta, 16 Desember 2025

PIHAK KEDUA
Inspektur Jenderal

Ade Tajudin Sutiawarman

PIHAK PERTAMA
Inspektur IV

Febry Budianto

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran 5.

Dokumen Pendukung Pengelolaan Kinerja Inspektorat IV Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tautan: https://bit.ly/datadukungLKJ2025IT4

Lampiran 6.

Rencana aksi Inspektorat IV Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tautan: https://bit.ly/rencanaaksiIT42025

Lampiran 7.

Evaluasi Rencana aksi Inspektorat IV Tahun 2025 sebagaimana terlampir pada tautan: https://bit.ly/evaluasirencanaaksiIT42025TWIV

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara